

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kota Batam adalah salah satu kota industri terbesar di Indonesia. Pada tahun 1970-an sesuai dengan keputusan Presiden No 41 tahun 1973, pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja industri. Pembangunan Kota Batam tidak lepas dari dukungan dan Otorita Batam yang lebih dikenal sekarang menjadi Badan Pengusahaan (BP Batam). Batam sebagai salah satu daerah industri sangat diuntungkan oleh letak geografis pulau Batam yakni, berbatasan dengan negara Singapura dan Malaysia, serta terletak di selat Malaka yang merupakan lintasan pelayaran sibuk dunia.

Seiring kemajuan Kota Batam pada tahun 1980 dengan kebijakan pemerintah No.34 tahun 1983 kawasan kecamatan Batam yang menjadi bagian Kabupaten Kepulauan Riau. Saat ini Kota Batam merubah statusnya sebagai Kotamadya, Batam yang mempunyai pekerjaan untuk melaksanakan administratif pemerintah dan kemasyarakatan bersama mendukung pembangunan yang dilaksanakan Otorita Batam (BP Batam). Di era reformasi pada akhir dekade pada tahun 1990-an dengan Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999, maka Kotamadya administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah Otonomi, yaitu pemerintah Kota Batam untuk menjalankan tugas Pemerintahan dan pembangunan dengan mengikut sertakan badan Otorita Batam (BP Batam).

Di era Globalisasi yang sekarang, pemerintah daerah mendorong masyarakat supaya bisa berinovasi untuk mencapai kemakmuran hidup. Salah satunya adalah dengan melakukan pelatihan bertahap ke setiap individu. Dalam hal ini yang termasuk hal penting dari pencapaian dalam perekonomian daerah, bahwa seluruh yang dibuat oleh rakyat mencangkup hal positif namun selain itu masih ditemukan hal negatif kesalahan individu khususnya untuk membentuk kerangka sumber daya manusia.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur dan penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat. Penyediaan infrastruktur tersebut membutuhkan biaya yang berasal dari pemerintah, dalam hal ini bisa dilihat bagaimana suatu daerah bisa mengelola keuangannya sendiri dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan pembangunan infrastruktur yang memadai terlihat dari pengelolaan keuangan di daerahnya. Apabila keuangan suatu daerah dipergunakan dengan baik maka pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah akan meningkat dan begitu pula sebaliknya.

Sarana dan prasarana yang baik yang digunakan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik, seperti penyediaan fasilitas publik demi memperlancar tugas pemerintah merupakan salah satu fungsi dari Belanja Modal. Peran pemerintah di dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator, karena dalam hal ini pihak pemerintahan yang lebih mengetahui sarana dan tujuan pembangunan yang akan dicapai.

Belanja Modal yang diberikan untuk pelayanan publik yang bersifat mendukung dan memberikan pelayanan perekonomian daerah yang

berkualitas. Ditambahkannya infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat memberi dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Belanja Modal berkaitan dengan Investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan ditambahkannya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah

Menurut Nordiawan (2010:71) Belanja Modal adalah pengeluaran yang menaikan total asset ataupun suatu kekayaan lembaga sektor publik dengan memberikan manfaat periode anggaran. Belanja dikelompokan berdasarkan kelompok ekonomi (jenis belanja), lembaga. Klasifikasi ekonomi adalah kelompok belanja yang menurut jenis belanja untuk melakukan suatu kegiatan. Klasifikasi ini meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer. Klasifikasi kedua adalah menurut organisasi, yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Sementara itu, klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan kepada masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan ekonomi daerah yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini menyimpulkan bahwa belanja modal sangat penting karena membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Belanja infrastruktur termasuk dalam bagian belanja modal pemerintah kota Batam, yaitu pengeluaran anggaran untuk

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode Akutansi

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, yang asalnya dari daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah serta Lain Lain Pendapatan yang Sah (Kristina Napitupulu, 2017). Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberi keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan potensi yang dimiliki tiap-tiap daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli daerah merupakan tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah dalam rangka pelayanan publik. Adapun sumber Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain Lain Pendapatan yang Sah, dari ketiga sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah dan dapat memberikan pelayanan yang semakin baik kepada publik. Sejauh ini Pemerintah Kota Batam masih terus berupaya untuk meningkatkan daerah dan memberikan pelayanan terbaik khususnya disektor yang dapat memberikan banyak peluang masuknya pendapatan regional daerah.

Selain Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan juga salah satu yang mendorong pertumbuhan daerah. Dana Perimbangan merupakan dana yang

berasal dari APBD. Tujuan dari Dana Perimbangan tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pemerintah daerah, harapannya pemerintah daerah bisa menyesuaikan pengeluaran kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan dalam kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, dan berkesinambungan guna untuk mencapai indikator keberhasilan pemerintah yang secara bertahap akan berdampak pada peningkatan perekonomian nasional.

Selain berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana perimbangan pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya, seperti halnya Lain-lain Pendapatan yang Sah. Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Jenis Lain-Lain Pendapatan asli Daerah yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah (Putra, 2018)

Dalam hal ini otonomi daerah yang terjadi bukan hanya penyerahan tugas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah saja, namun disertai dengan pelimpahan wewenang untuk dapat mengelola pemerintahannya sendiri. Dalam hal ini ditunjukkan bahwa belanja modal salah satu tujuan otonomi daerah yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan melakukan pergeseran belanja merupakan salah satu cara pemerintah daerah yang logis dalam meningkatkan kepercayaan publik. Pergeseran komposisi belanja dapat dilihat dari peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Diharapkan dengan

dengan meningkatnya tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan persyaratan utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah. Maka dari itu pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas umum. Berikut laporan realisasi anggaran Kota Batam Periode 2013-2017.

**Tabel 1. 1 Realisasi Anggaran Kota Batam (Miliar Rupiah)**

<b>Realisasi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Pertumbuhan Ekonomi	96,661	107,219	120,945	130,553	137,467
Pendapatan Asli Daerah	606,340	779,944	836,713	881,268	974,023
Dana Perimbangan	980,450	969,623	849,850	951,714	962,500
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	93,387	129,081	4,952	132,296	217,182
Belanja Modal	358,874	492,747	524,332	524,463	556,926

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk peneliti Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain Lain Pendapatan yang Sah, yang diharapkan dapat memberikan informasi yang besar mensukseskan pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini peneliti memilih judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain Lain Pendapatan yang Sah Terhadap Belanja Modal di Kota Batam**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan yang diterapkan dalam target nasional untuk mencapai pemerataan perekonomian belum memperoleh output maksimal untuk dipergunakan publik.
2. Dana yang ditransfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah dalam satu periode masih perlu dilakukan penghematan dalam belanja keperluan Belanja Modal daerah khususnya aset tetap.
3. Rendahnya sumber daya manusia tentang perlunya pembangunan nasional dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah

## **1.3 Batasan Masalah**

Banyak masalah yang bisa diangkat untuk penulisan ini, namun penulis perlu membatasi masalah yang lebih terperinci dan jelas agar pemecahannya terarah yang berhasil yang terdiri dari.

1. Variabel Independen (bebas) yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain Lain Pendapatan yang Sah sedangkan Variabel terikat adalah Belanja Modal
2. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah Laporan Keuangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dibatasi hanya pada Kota Batam saja.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Dari penelitian ini ada hal yang ingin dicari jawabanya. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan menjelaskan pertanyaan sebagai berikut.

1. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal Pemerintah Kota Batam?
2. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal Pemerintah Kota Batam?
3. Apakah terdapat pengaruh Dana Perimbangan terhadap belanja modal Pemerintah Kota Batam?
4. Apakah terdapat pengaruh Lain Lain Pendapatan yang Sah terhadap belanja modal Pemerintah Kota Batam?
5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain Lain Pendapatan yang Sah secara bersama sama berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintahan Kota Batam?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja Modal Pemerintah Kota Batam.

2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal Pemerintah Kota Batam.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pemerintah Kota Batam.
4. Untuk mengetahui pengaruh Lain Lain Pendapatan yang Sah terhadap belanja Modal Pemrintah Kota Batam.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain Lain Pendapatan yang Sah secara bersama sama terhadap Belanja Modal di Kota Batam.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini penulis diharapkan dapat memberi manfaat atau makna yang dapat diambil diantaranya sebagai berikut:

#### 1.2.1 Manfaat Teortis

Dari penelitian yang dilakukan harapanya dapat memperbanyak pengetahuan pembaca secara teoritis tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan yang Sah Terhadap Belanja Modal di Kota Batam dan sebagai bahan pertimbangan antara teori nyata dalam organisasi yang selanjutnya menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut.

#### 1.2.1 Manfaat Praktis

- 1) Bagi Penulis

Setelah dilakukanya penelitian ini harapanya dapat menjawab masalah yang sudah ditentukan sebelumnya. Diluar itu harapanya penelitian ini dapat memperbanyak ilmu dan pengetahuan tentang Akutansi Pemerintah.

2) Bagi Akademis

Penelitian ini harapanya bisa memperbanyak acuan untuk penelitian agar bisa memberi dorongan untuk melaksanakan penelitian berikutnya pada akutansi sektor publik. Selain itu untuk mendapat data beserta berita tentang Kota Batam.

3) Bagi Objek Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat meberikan masukan mengenai pengembangan atas peningkatan APBD, sehingga dimasa mendatang daerah otonom dapat mengembangkan dan membangun daerahnya dengan sumber pendanaan dan hasil kekayaan daerah masing-masing. Diharapkan konsep Desentralisasi sesungguhnya dapat terwujud secepatnya.